

Judul : Miliaran rupiah perawatan rusa di DPR
Tanggal : Minggu, 21 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Miliaran Rupiah Perawatan Rusa DPR

Jika dibandingkan dengan sejumlah penangkaran, biaya pemeliharaan rusa di Kompleks MPR/ DPR/ DPD di Jakarta terbilang tinggi. Tahun 2025 saja, anggarannya mencapai Rp 1,96 miliar dari pagu Rp 3,1 miliar.

Nikolaus Harbowo dan
Machradin Wahyudi
Ritonga

Mobil bak terbuka berhenti di tepi taman rusa di areal Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. Empat penjaga langsung bergegas menurunkan karung-karung besar berisi wortel, ubi singkong, dan aneka sayuran. Karung-karung itu dipikul satu per satu, lalu disusun rapi di gudang kecil di sudut taman.

Tak jauh dari sana, sebanyak 163 rusa total tampak sudah berkumpul, seolah tahu waktu makan telah tiba. "Kadang sekali makan bisa habis tiga karung. Satu karung 50 kilogram," ucap Adit, salah satu penjaga taman rusa di Kompleks Parlemen.

Rata-rata sehari bisa tiga kali makan, sekitar 450 kilogram. Campur-campur, bisa ubi, wortel, sayuran. Kadang malah empat kali. Kita saja (makan) tiga kali, ya," ujarnya diikuti dengan tawa kecil.

Hampir tiga tahun, pria itu menjalani rutinitas tersebut. Memberi makan rusa, merawat taman, sekaligus berjaga jika ada rusa yang sakit atau tengah bunting. Dalam melakukan tugasnya itu, ia lakukan sebagai karyawan kontrak dari pihak ketiga bersama 12 penjaga lain. Mereka bekerja bergiliran dalam beberapa shift kerja di area taman rusa seluas kurang lebih 12 hektar.

Keberadaan rusa di antara gedung MPR, DPR, dan DPD saat ini, bisa jadi tidak diketahui banyak orang. Pasalnya, lokasi taman tidak berada di tepi jalan utama. Pohon-pohon besar di sekeliling taman ikut menutupi pandangan warga yang beraktivitas di sekitar kompleks parlemen itu terhadap keberadaan rusa. Terlebih untuk bisa masuk ke areal Kompleks Parlemen tidak bisa sembarangan.

Sehari-hari, menurut Adit, warga yang sengaja berkunjung untuk melihat rusa di dalam Kompleks Parlemen itu tak banyak jumlahnya.

Sejak 1983

Rutinas rusa itu merupakan hasil kembang biak dari 10 rusa yang didatangkan dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta; dan Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat, pada 1983. Satwa berkulit elok yang leluhurnya dari India dan wilayah penyebaran hingga Sri Lanka itu disumbangkan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) kepada Sekretaris Jenderal DPR/MPR (Kompas, 15/2/1983).

Ketua PKBSI Harsono RM, kala itu, menuturkan, rusa total sekalipun bukan berasal dari Indonesia, tetapi sudah menjadi pribumi. Sebab, rusa total merupakan generasi keenam dari turunan yang di datangkan oleh Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles un-



tuk menyemarakkan Kebun Rusa Bogor, sekitar 200 tahun lalu.

Karena keberadaannya dekat dengan wakil rakyat, Harsono berkelakar bahwa keberadaan rusa itu layaknya wakil dari satwa-satwa yang sudah terancam punah. "Semoga pelepasan rusa di MPR/ DPR akan mewakili suara seluruh satwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya yang langka dan terancam kepunahan," ujar Harsono, kala itu.

Menjadi miliaran rupiah

Berkat adanya perawatan, 10 rusa hasil sumbangan itu kemudian terus bertambah setiap tahun hingga saat ini 163 rusa. Namun, yang mencengangkan, biaya pemeliharaan rusa beberapa tahun terakhir mencapai miliaran rupiah.

Dikutip dari Layanan Pengadaan secara Elektronik (LSPSE) DPR, tahun ini, jasa pemeliharaan rusa, perawatan media taman, hingga biaya pakan mencapai Rp 1,96 miliar dari pagu Rp 3,1 miliar. Kemudian, untuk tahun 2026, perusahaan yang untuk sementara memenangkan paket jasa serupa menawarkan harga Rp 3,2 miliar dari pagu Rp 5,7 miliar. Saat ini, proses lelang tengah memasuki masa sanggah.

Adapun pada 2015-2016, ketika jumlah rusa masih 48-58 ekor, anggaran untuk pemeliharaan berada di kisaran Rp 650 juta dan turun menjadi Rp 551 juta setelah lelang.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengemukakan



Rusa total (Arif aziz) ditangkarkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025) (foto atas). Penjaga taman rusa memberikan pakan berupa ubi ke rusa di Taman Rusa DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12) (foto bawah).

bahwa kenaikan anggaran dari tahun ke tahun merupakan imbas dari penambahan jumlah rusa. Kian banyak rusa memiliki efek domino terhadap berbagai pos biaya, mulai dari kesehatan hewan, perlengkapan pendukung, hingga pakan.

"Memang ada perubahan dari jumlah rusa, honor dokter hewan, tenaga perawat, hingga harga pakan dan perlengkapan pendukung," ujar Indra, Kamis (11/12/2025).

Namun, besarnya anggaran

pemeliharaan rusa di DPR tampak kontras jika dibandingkan dengan tempat lain, seperti The Joglo Garden Resto, Bekasi, Jawa Barat. Taman itu memiliki kebun binatang mini (*mini-zoo*) dengan rusa total sebagai salah satu penghuninya. Jumlah rusa di lokasi itu sekitar 100 ekor.

Marna (52), salah seorang penjaga di lokasi tersebut, mengatakan, biaya perawatan yang dikeluarkan perusahaan sekitar Rp 25 juta per bulan.

Dalam setahun, angkanya sekitar Rp 300 juta.

"Tua saja sudah gemuk-gemuk. Sudah lengkap semuanya, termasuk kesehatan, vitamin, dan suntikan. Kadang malah kelebihan anggaran. Pakannya juga sering dipakai bareng buat kuda. Di sini ada sembilan kuda," tambahnya.

Menurut Marna, jenis pakan dan pola perawatan rusa relatif serupa. Ubi, singkong, dan rumput menjadi menu utama.

Oleh karena itu, besaran anggaran pemeliharaan rusa di DPR terlihat tinggi. "Kalau menurut perhitungan saya, seharusnya enggak sampai miliaran. Terutama besar. Enggak masuk akal," ungkapnya.

Pemborosan

Wakil Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro menyebutkan, tidak hanya kali ini muncul pertanyaan dari besarnya anggaran untuk pemeliharaan rusa di DPR.

Pada 2022, misalnya, pertanyaan publik sempat pula mencuat karena alokasi anggaran untuk rusa sebesar Rp 2,57 miliar dinilai mawid di tengah pemalihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Ia juga membandingkan dengan penangkaran rusa lain di luar Jakarta. Di Taman Rusa Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, misalnya, biaya operasional tahunan untuk pemeliharaan lebih dari 100 rusa berada di kisaran Rp 500 juta-Rp 700 juta. Angka itu sudah mencakup pakan rumput dan tenaga kerja dengan sebagian biaya ditutup dari penjualan tiket masuk seharga Rp 5.000 per dewasa.

Perbandingan lain datang dari Wisata Rusa Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat. Di lahan seluas 8,4 hektar, sekitar 200 rusa dirawat dengan anggaran Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar per tahun. Pengelola mengandalkan dukungan swasta dan pengunjung, bukan sepenuhnya dari anggaran negara.

Adapun patokan umum pemeliharaan rusa total di kebun binatang Indonesia, merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup, berada di kisaran Rp 3 juta-Rp 5 juta per ekor per tahun. Biaya itu sudah mencakup pakan, suplemen, dan perawatan medis. Maka, untuk 100 rusa, total anggaran umumnya berkisar Rp 300 juta-Rp 500 juta per tahun.

Oleh karena itu, menurut dia, biaya pakan miliaran rupiah untuk rusa di DPR tidak masuk akal. "Angkanya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan tempat lain," kata Arif. Lebih lanjut, menurut dia, kasus pemeliharaan rusa ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pos belanja DPR kerap menuai sorotan publik, mulai dari pengadaan gorden rumah jabatan senilai Rp 48,7 miliar pada 2022, pengharum ruangan Rp 2,3 miliar pada 2015, hingga dana rease yang mencapai sekitar Rp 2,5 miliar per anggota per tahun. Hal itu mengindikasikan persoalan berulang terkait efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan penetapan prioritas anggaran.

Ini lebih mirip pemborosan daripada kebutuhan wajar. DPR seharusnya jadi teladan efisiensi anggaran," ucapnya.

Arif juga menyoroti minimnya transparansi dalam perencanaan anggaran tersebut. Menurut dia, DPR semestinya membuka rincian rencana anggaran biaya secara lebih detail, mulai dari pakan, perawatan medis, hingga tenaga kerja, melalui sistem pengaduan yang dapat diakses publik.

"Mengapa tidak ada pemisahan yang jelas dan bisa dilihat publik? Ini, kan, APBN, uang rakyat, bukan proyek pribadi," ujarnya.

Ia pun mendorong anggaran pemeliharaan aset simbolik seperti taman rusa diadiri secara independen oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih jauh, Arif menilai, anggaran pemeliharaan rusa mencerminkan pola belanja DPR yang kerap menuai kritik. Pada 2026, total anggaran DPR mencapai Rp 99 triliun, meningkat tajam dibandingkan dengan Rp 54 triliun pada 2021. Kenaikan itu terjadi di tengah tekanan ekonomi, inflasi, dan gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah daerah.

DPR sering mengkritik pemborosan di eksekutif. Tetapi, ketika anggaran pemeliharaan rusa mencapai miliaran rupiah, publik tentu bertanya soal konsistensi," ujar Arif, seraya menyinggung kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan dampak bencana dan tekanan ekonomi, sekaligus mengingatkan inkonsistensi DPR yang bisa menggusur kepercayaan publik.